

KEBIJAKAN PUBLIK VERSI WILLIAM DUNN: ANALISIS DAN IMPLEMENTASI

PUBLIC POLICY BY WILLIAM DUNN: ANALYSIS AND IMPLEMENTATION

Yanti Fatmariyanti^{1*}, Anis Fauzi²

^{1,2}UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

¹yfatmariyanti@gmail.com. ²anisfauzi@uinsmh.ac.id

Abstrak

Analisis kebijakan merupakan aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, yang meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Dalam penerapannya, kebijakan public seringkali menemui hambatan baik dari internal maupun eksternal penyelenggara kebijakan tersebut, sehingga perlu dikaji bagaimana implementasi kebijakan public terkait dengan factor-faktor dan dimensi-dimensi yang mempengaruhinya. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah itu analisis kebijakan public menurut William Dunn dan Impelementasinya. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa analisis kebijakan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya kebijakan public dan perlu diadakan penyebaran substansi atau sosialisasi dari kebijakan tersebut, sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik

Abstract

Analysis of Policy is the activity of creating knowledge about and in the policy-making process, which examines the causes, effects, and performance of public policies and programs. In its application, public policy often encounters obstacles both internal and external to those implementing the policy, so it is necessary to study how the implementation of public policy is related to the factors and dimensions that influence it. this article aims to find out what is public policy analysis according to William Dunn and its implementation. The writing method in this study uses qualitative research methods, by conducting literature searches, searching relevant sources and searching data via the internet, electronic media, and some relevant literature. The results of the study illustrate that policy analysis needs to be carried out before public policies are issued and it is necessary to disseminate the substance or socialization of these policies, as a basis for knowledge and understanding before the policy implementation process is carried out.

Keywords: Public Policy Analysis, Public Policy Implementation

PENDAHULUAN

Dalam setiap tatanan pemerintahan dibutuhkan adanya suatu program yang dapat berjalan untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam pemerintahan tersebut, sehingga perlu dibuat suatu kebijakan publik yang dapat diterima dan diterapkan di seluruh tatanan pemerintahan. Namun seringkali kebijakan publik mengalami pertentangan dari berbagai pihak sebelum diterapkan, sehingga perlu diadakan perumusan yang matang terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi sebuah kebijakan. Benar adanya yang dinyatakan oleh Raymond A Bauer bahwa perumusan kebijakan adalah proses sosial dimana proses intelektual melekat di dalamnya. Analisis kebijakan itu sendiri merupakan aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, yang meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik (William Dunn, 2018). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan

dapat ditafsirkan sebagai suatu gerakan sebagai upaya untuk memahami kembali peran pemerintah dalam masyarakat dan menegosiasikan kembali aspek hubungan yang ada antara individu, kolektivitas dan pemerintah (Hermanto Suaib, dkk, 2022).

Salah satu contoh dalam penerapan kebijakan publik yaitu pada Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Banyumas, implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau implementor yang bertujuan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Program tersebut sudah berjalan dengan baik dengan ditandai adanya proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan Standar Operasional dan Prosedur yang berlaku (Putri Mutiara Rakista, 2020).

Namun adakalanya implementasi kebijakan publik juga mendapat tantangan dari internal penyelenggara negara itu sendiri, sebagaimana contohnya yang disampaikan oleh Ahmad Fauzi (2020) dalam implementasi kebijakan publik Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu metode penanganan pandemik Covid-19, yang dalam penerapannya menemukan permasalahan yaitu tidak semua penyelenggara negara memahami tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena belum satu komando, sehingga mengalami bias dalam implementasi, dan tidak semua Kepala Daerah, memahami kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sungguh hal tersebut merupakan sebuah ironi bagi bangsa ini. PSBB pada masa pandemik Covid-19 juga berpengaruh besar pada dunia Pendidikan, seluruh Lembaga Pendidikan mendapatkan sosialisasi yang terus menerus dari instansi terkait agar memahami dasar hukum pelaksanaannya dalam satu komando dan mendapatkan teguran atau sanksi jika melanggar. Pengelola Lembaga Pendidikan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap SOP penanganan pandemi Covid-19, tidak kalah pentingnya yaitu komitmen pimpinan dari semua pihak dengan terus mengupayakan untuk melengkapi sarana penanganan pandemi Covid-19.

Dengan demikian, penyebaran substansi suatu kebijakan atau sosialisasi kebijakan publik perlu dilakukan setelah kebijakan dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan, agar setiap orang dapat mengetahui dan memahami kebijakan tersebut, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan publik tersebut dapat direalisasikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan artikel ini yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya (Sudaryono, 2019:97). Dalam hal ini data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi Pustaka (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (dalam Winarno, 2002 :16). Kebijakan publik menurut Laswel dan Kaplan, pada hakekatnya merupakan “Suatu keputusan yang sudah mantap atau *“a standing decision”* menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan

instansi-instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara. Keputusan mana didasarkan pada pilihan-pilihan atau pertimbangan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai.

Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dalam proses kebijakan publik tersebut menurut William N. Dunn melalui 5 tahap yang meliputi:

1. Tahap Perumusan Masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Tahap Forecasting (Peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3. Tahap Rekomendasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
4. Tahap Monitoring Kebijakan Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

B. Definisi Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan menurut E.S Quade dalam buku Willian Dunn, adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memisahnya ke dalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru.

Sedangkan William N. Dunn (2018) mendefinisikan analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Dunn mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya analisis kebijakan adalah, "suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik". (Dunn, 2018). Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di atas, maka analisis kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk menciptakan pengetahuan tentang sesuatu dan dalam proses pembuatan kebijakan.

C. Proses Pembuatan Kebijakan

Keberhasilan analisis pembuatan kebijakan menurut Dunn, dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

1. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
2. Proses pembuatan kebijakan, adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

3. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. (Dunn, 2018).

D. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu.

1. Analisis Kebijakan Prospektif
Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. Analisis Kebijakan Retrospektif Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

E. Model-Model Kebijakan

Berikut ini adalah model-model kebijakan menurut William Dunn:

1. Model Deskriptif

Model-model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi yang paling penting diantaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi dan fungsi metodologi dari model. Dua bentuk utama model kebijakan adalah deskriptif dan normative.

2. Model Normatif

Sebaliknya, tujuan model normative bukan hanya untuk menjelaskan dan/atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai).

3. Model Verbal

Model Verbal (*Verbal models*) diekspresikan dalam bahasa sehari-hari. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan di mata para ahli dan orang awam, dan biayanya murah. Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan.

4. Model Simbolis

Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan di antara variabel-variabel kunci yang dipercaya menjadi suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam metode-metode matematika, statistika, dan logika. Model-model simbolis sulit untuk dikomunikasikan di antara orang awam, termasuk para pembuat kebijakan.

5. Model Prosedural

Model prosedural (*Prosedural models*) menampilkan hubungan yang dinamis di antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

F. Implementasi Kebijakan

Kata implementasi berasal dari terjemahan kata dalam Bahasa Inggris yaitu “*implementation*” yang berasal dari kata kerja “*to implement*” yang berarti “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu” (Webster’s Dictionary, 1979).

Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete.*” Berarti bahwa implementasi adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. (Tachjan, 2006).

Kata Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pelaksanaan atau penyelesaian suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan, dimana penyelesaian tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana (alat) agar tujuan kebijakan tercapai. Implementasi kebijakan publik dapat dilakukan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Abdullah Ramdhani, 2017).

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program. Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik (Mthethwa. R.M, 2018).

G. Aspek-aspek Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Edwards III dalam (Arifin.T, 2018), pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasikan aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal- signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan.

2. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi (Warjio Afandi, 2015).

3. Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka

pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Warjio Afandi, 2015).

4. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010) dalam (Warjio Afandi, 2015). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.

H. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *Good Governance*, menurut pemahaman penulis maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur atau dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi (Rian. N.D, 2017):

1. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.

2. Transparansi

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan (Coryanata, 2007) dalam (Rian. N.D, 2017). Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti.

3. Akuntabilitas

Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Rian. N.D, 2017).

4. Keadilan

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

5. Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang percetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif (Coryanata, 2007) dalam (Rian. N.D, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan

sebaiknya bersifat partisipatif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat.

6. Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan public.

7. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya.

Menurut William Dunn (2018), tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam "*Policy inputs and policy process*". *Policy inputs* berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan.

Dengan demikian, dapat diuraikan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) agar dapat diwujudkan sebagai hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

I. Unsur-unsur dalam Implementasi Kebijakan

1. Unsur Pelaksana (*Implementor*)

Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik merupakan pihak yang mempunyai kewajiban utama melaksanakan kebijakan publik (Sharkansky, 1975; Ripley & Grace A. Franklin, 1986). Hal ini karena unit-unit tersebut memiliki fungsi sebagai alat atau sarana dalam berbagai kegiatan administratif yang berkaitan dengan terselenggaranya proses kebijakan publik.

2. Program

Penyusunan program dalam implementasi kebijakan public, harus bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional. Oleh karenanya, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dituangkan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Hasil akhir dari kegiatan tahap pertama dari unit administrative tersebut, jika dilihat sebagai suatu sistem maka akan berupa kebijakan-kebijakan administratif, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program (Lemay, 2002: 33). Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980: 6) bahwa : "*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect*"

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan,

kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

3. Target Groups

Target groups atau sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, bergantung kepada kesesuaian isi dari kebijakan (program) tersebut, dengan harapan mereka. dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti: besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi berpengaruh terhadap efektifitas implementasi. Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektifitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan.

KESIMPULAN

Analisis kebijakan menurut William Dunn, adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Dengan kata lain, analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan,

Setiap kebijakan yang telah dibuat, tentu saja diharapkan dapat diterapkan, sehingga perlu mengetahui apakah itu Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi. Dalam implementasi kebijakan, perlu memperhatikan juga unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, yaitu implementor atau pelaksana, program yang akan dilaksanakan, dan target groups atau sekelompok orang atau organisasi yang merupakan sasaran dari implementasi publik. Hal-hal tersebut di atas harus saling sinergis agar terbentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, 2017, Konsep Umum Pelaksanaan Publik, Jakarta: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ISSN: 1412-7083
- Afandi, I., & Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.
- Andi Cudai Nur, Muhammad Guntur, Analisis Kebijakan Publik, Makassar: Badan Penerbit UNM, 2019
- Arifin.T, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta Pusat: PT. Pustaka Indonesia Press. Kemayoran, 2018

- Asep Abdul Aziz, Rida Nurfarida, Nurti Budiyantri, Qiqi Yulianti Zakiah, 2020, Model Analisis Kebijakan Pendidikan, Metro: Jurnal Penelitian Ilmiah ISSN: 2579-3233
- Chazalih Situmorang, Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan), Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, 2016
- Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati, 2021, Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan, Padang: Indo Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI) ISSN: 2502-079X
- Erwan Agus Puwanto, Konsep dan Aplikasi Implementasi Kebijakan Publik. I.s. Islamy, I. (2019). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Hermanto Suaib, A Sakti R, S Rakia, Arie Purnomo Hayat M, Chorella, Pengantar Kebijakan Publik, Makassar: Humanities Genius, 2022
- Intan Fitri Meutia, Analisis Kebijakan Publik, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017
- Jumria Mansur, 2021, Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik, Jurnal Ekonomi Islam AT-TAWASSUTH, ISSN: 2549-0230
- Mthethwa, R. M. (2018). *Critical Dimensions for Policy Implementation*. African Journal of Public Affairs, Vol.5. no.2. ISSN: 0136-1142. Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2023 Pukul 21.30 WIB
- Rian. N.D, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Bandung, 2006
- William H. Dunn, Penterjemah: Samudra Wibawa, dkk, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018